

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional, implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Adanya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya, peranan masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola program atau kegiatan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan. Dimana lembaga

kemasyarakatan sebagai wadah aktualisasi diri warga masyarakat di lingkungannya sehingga dari aspek sosial kemasyarakatan, masyarakat akan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem pembangunan yang lebih luas, dengan kata lain kesadaran akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dahulu lebih dikenal dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada dasarnya merupakan organisasi sosial yang ada di tingkat Desa atau Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana untuk menampung aspirasi, harapan, keluhan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Pemerintah Desa atau Kelurahan agar dapat diwujudkan atau dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 disebutkan lebih tegas dan jelas bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Oleh karena itu, mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut dan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Nomor : 14/SK/LPM/DPC-BJLKR/I/2014 tentang Pengesahan Organisasi dan Penetapan Pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Masa Bhakti 2014-2017 menetapkan :

1. Mengesahkan terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Masa Bhakti 2014-2017.
2. Mengesahkan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang terdiri dari Seksi Pendidikan dan Kebudayaan, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Agama, Seksi Pemebrdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Seksi Kesejahteraan Sosial. Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus periode sebelumnya atas pengabdian kepada masyarakat.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dan ke-2 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah
 - b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 - c. Memantau pelaksanaan pembangunan
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan.

- b. Sebagai mediator komunikasi dan informasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas yaitu menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah, menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, memantau pelaksanaan pembangunan, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat. Maka berdasarkan kepada pengertian tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis yaitu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Hal ini berarti pula bahwa segala aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan baik fisik maupun non fisik dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan yang lainnya sebaiknya dikoordinasikan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai mitra Lurah dalam menampung aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukaasih menyusun program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Tugas Pokok dan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi Kelurahan Sukaasih. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup:

- 1) Administrasi dan surat menyurat
- 2) Organisasi

- 3) Kegiatan rapat, pertemuan, pelantikan dan upacara
- 4) Kegiatan infrastruktur
- 5) Kegiatan sosial
- 6) Sumber dana

Pada awal terbentuknya kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Masa Bhakti 2014-2017 yaitu dengan jumlah pengurus sebanyak 9 (sembilan) orang. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak aktif dalam kelembagaan dan kurang memiliki integritas serta komitmen untuk memajukan masyarakat Sukaasih. Sehingga kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat saat ini berjumlah 5 (lima) orang.

Berdasarkan observasi awal dilapangan, peneliti melihat bahwa selama ini efektivitas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung belum efektif. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dalam data tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Massa Bhakti Tahun 2014-2017

Periode Tahun	Pengurus Yang Aktif	Pengurus Yang Tidak Aktif	Jumlah Pengurus
2013-2016	5	4	9

Sumber Kelurahan Suka Asih 2017

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa keaktifan setiap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Masa Bhakti 2014-2017 menurun. Jumlah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan adalah 9 (sembilan) orang akan tetapi sampai saat ini hanya 5 (lima) orang yang masih aktif dalam kepengurusan. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh beberapa pengurus menyebabkan semakin berkurangnya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Akan tetapi 5 (lima) orang yang dinyatakan aktif pada kenyataan dilapangan tidak seperti itu, dikarenakan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh kelurahan maupun kecamatan hanya ketua lembaga pemberdayaan masyarakat saja yang aktif ikut serta sedangkan pengurus yang lain hanya sesekali saja mengikuti. Seperti halnya pada kegiatan yang diselenggarakan oleh RT/RW yaitu pada kegiatan perbaikan jalan, perbaikan gapura, perbaikan mesjid, pengerukkan kanal, perbaikan gorong-gorong dan pemeliharaan tanaman yang seharusnya terdapat perwakilan dari pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang merupakan salah satu tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 akan tetapi pada kenyataannya tidak ada.

Indikasi-indikasi lain yang ditemukan dari hasil observasi mengenai belum efektifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah tidak dilaksanakan secara optimal oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dimana terdapat 6 kebijakan mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

namun pada setiap tugas dan fungsinya tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Ketidaksesuaian waktu pekerjaan dengan kebutuhan dari masyarakat. Seperti dalam membberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa menampung keluhan dan memberika solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh warga sukaasih sehingga tidak berlarut-larut contohnya pada pendistribusian bantuan beras yang tidak merata.
3. Masih adanya Pengurus RW/RT dan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat termasuk tugas pokok dan fungsinya. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan terhadap masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat termasuk tugas dan fungsinya.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap media sosialisasi yang digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seperti twitter, facebook, dan blog. Dimana tidak semua masyarakat mempunyai alat komunikasi seperti android atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengakses internet.
5. Tidak jelasnya sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
6. Belum memadainya fasilitas tempat untuk mendukung kinerja para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak memiliki kantor tersendiri akan tetapi satu kantor dengan kelurahan.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa belum efektifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut menurut pendapat peneliti erat kaitannya dengan belum optimalnya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Sukaasih. Dengan demikian kiranya cukup beralasan jika permasalahan yang timbul dikaji melalui analisis kepemimpinan. Karena berdasarkan teoritis, kepemimpinan adalah kegiatan

mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya agar mereka bertindak sesuai dengan harapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun untuk variabel kepemimpinan, penulis mencoba menerapkan teknik-teknik kepemimpinan menurut Syafi'ie (2013:41-45) yaitu teknik persuasif, teknik komunikatif, teknik fasilitas, teknik motivasi dan teknik keteladan.

Berdasarkan konsep di atas, peneliti menduga melalui teknik-teknik kepemimpinan dapat memberikan kontribusi penting untuk diteliti. Dalam melaksanakan kepemimpinan, Lurah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengetahui dan meneliti lebih jauh di dalam permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji “Seberapa Besar Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.”

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Besarnya Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi Lurah Sukaasih untuk lebih memandirikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

